

Kajian Variabel Penentu Peningkatan Status Jalan Nasional Di Lintas Selatan Jawa Barat

Noor Fachrie¹, Iwan Rudiarto²

Diterima : 29 Desember 2015

Disetujui : 29 Januari 2016

ABSTRACT

The Indonesian archipelago that stretches from Sabang (Sumatra Islands) to Merauke (Papua Islands) has a variety of abundant natural resources , one of which are West Java Province . Central Government through the Ministry of Public Works – Public Housing has allocated Rp 1 trillion in APBN 2013 (presidential directive allocation) for the road construction of south traffic in West Java. This thesis aims to assess the effect / assessment of variables (i) land use - transportation; (ii) the pattern of development of the area and the road network system; (iii) spatial and regions; and (iv) the level of transport in the National Transportation System (SISTRANAS) towards improving the status of south traffic road of West Java to be became a national road in perspective the function of the road network, which is expected to provide an objective assessment in evaluating the proposed of roads status improvement. Positivist and rationalistic approach used in this study to design variables and criteria for assessment of land use; the pattern of development of the area and the road network system; spatial and regions; as well as the transport level in the National Transportation System (SISTRANAS). Quantitative descriptive method in this research is intended to provide a description / overview and assessment of data analysis in the form of numbers. The research concludes that the variable of land use - transport and national transportation system (Sistranas) variable can be taken into consideration, because these two variables more realistic in assessing improvement the status and function of the national road compared to the other variables.

Keywords : Roads Status, Land Use, Spatial and Regions, National Transportation System

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan yang membentang dari Sabang (Kepulauan Sumatera) sampai Merauke (Kepulauan Papua) memiliki beragam sumber daya alam yang melimpah, salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU – PERA telah mengalokasikan Rp 1 triliun dalam APBN 2013 (alokasi direktif presiden) untuk pembangunan infrastruktur jalan lintas Selatan Jawa Barat. Penelitian tesis ini bertujuan mengkaji pengaruh/penilaian variabel (i) tata guna lahan - transportasi; (ii) pola perkembangan wilayah dan sistem jaringan jalan; (iii) tataruan dan wilayah; serta (iv) tataran transportasi dalam Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS) terhadap peningkatan status ruas jalan lintas selatan Jawa Barat menjadi jalan nasional dalam perspektif fungsi jaringan jalan, sehingga diharapkan dapat memberikan penilaian yang obyektif dalam mengevaluasi usulan peningkatan status ruas jalan. Pendekatan positivis dan rasionalistik digunakan dalam penelitian ini untuk mendesain variabel serta kriteria penilaian tentang tata guna lahan; pola perkembangan wilayah dan sistem jaringan jalan; tataruan dan wilayah; serta tataran transportasi dalam Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS). Metode deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan/gambaran penilaian dari analisis data dalam bentuk angka-angka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel tata guna lahan - transportasi dan variabel tataran transportasi nasional (Sistranas) lebih dapat dijadikan pertimbangan realistis dalam penilaian peningkatan dan fungsi ruas jalan dibandingkan variabel - variabel lainnya.

¹Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV Jakarta, Bina Marga

Kontak Penulis : fachrietgpa.e1@gmail.com

²Dosen Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

Kata Kunci: Status Ruas Jalan, Tata Guna Lahan, Tata Ruang dan Wilayah, Sistem Transportasi Nasional

PENDAHULUAN

Pulau Jawa sebagai barometer keberhasilan pertumbuhan perekonomian di Indonesia belum sepenuhnya merata di setiap wilayah. Sebagai contoh di Provinsi Jawa Barat dimana bagian utara Provinsi Jawa Barat jauh lebih berkembang pesat dibandingkan bagian selatan Provinsi Jawa Barat, hal ini terlihat dari rata-rata PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2011-2012 wilayah utara sebesar Rp. 18.534.944 juta, wilayah tengah sebesar Rp. 11.839.479 juta dan wilayah selatan sebesar Rp. 8.180.994 juta Jawa Barat (BPS Provinsi Jawa Barat, 2014). Beberapa ruas jalan di bagian selatan Jawa Barat tersebut menghubungkan antara PKN, PKW akan tetapi belum menjadi bagian dari sistem jaringan jalan nasional. Terdapat relevansi yang erat antara pembangunan nasional dengan pembangunan wilayah (daerah). Pembangunan nasional adalah mendorong pembangunan daerah (regional) dan pembangunan regional adalah memperkuat pembangunan nasional, untuk menjembatani pembangunan nasional dan pembangunan regional dibutuhkan tersedianya transportasi yang berkapasitas efektif dan efisien,

dimana transportasi tersebut menjadi efektif dan efisien bila tersedia jaringan prasarana jalan yang baik, jauh dari kondisi rusak serta berkeselamatan bagi penggunaannya (Adisasmita, 2011). Menurut Pradhan dan Bagchi (2013), kebijakan transportasi yang tepat dapat menstimulus pengembangan infrastruktur jalan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

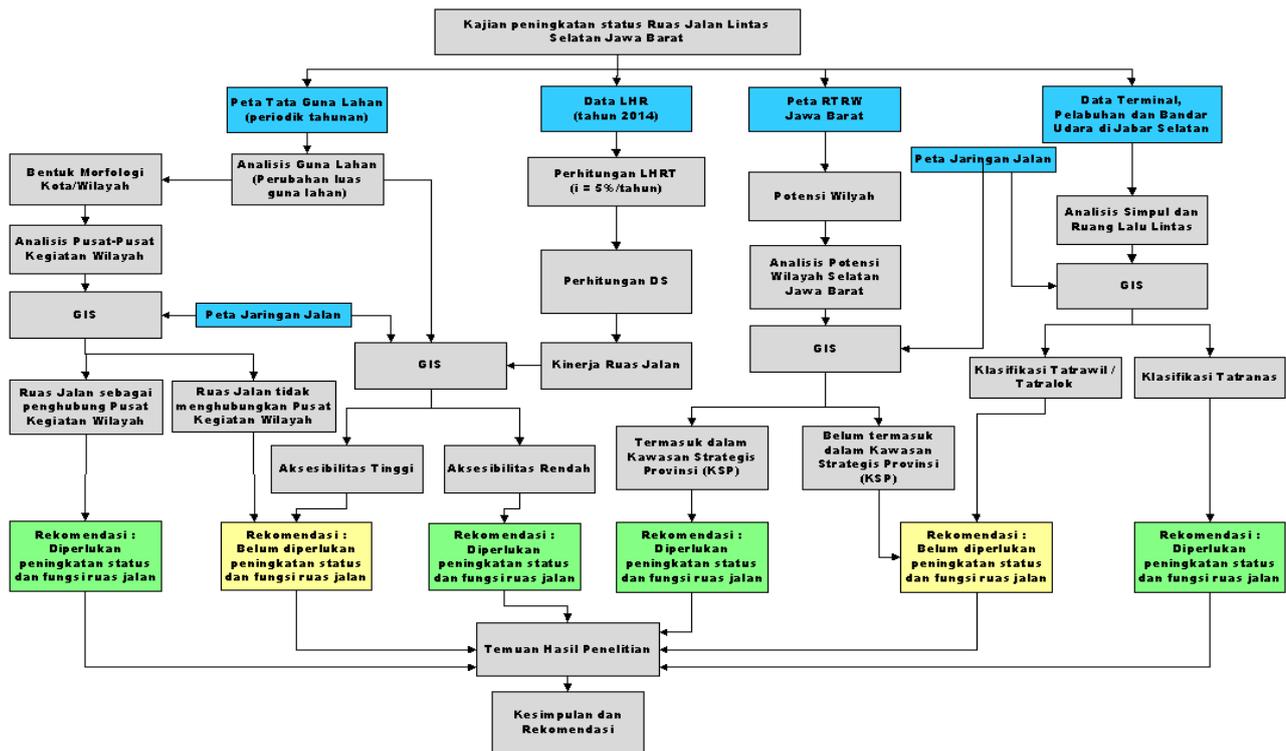
Berdasarkan hal tersebut maka fenomena ini menarik untuk dilakukan kajian peningkatan status jalan non nasional menjadi jalan nasional pada wilayah selatan Jawa Barat.

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh/penilaian variabel (i) tatagunalahan - transportasi; (ii) pola perkembangan wilayah dan sistem jaringan jalan; (iii) tataruang dan wilayah; serta (iv) tataran transportasi dalam Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS) terhadap peningkatan status ruas jalan lintas selatan Jawa Barat menjadi jalan nasional dalam perspektif fungsi jaringan jalan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penilaian yang obyektif dalam mengevaluasi usulan peningkatan status ruas jalan nasional serta mendorong pemerintah pusat untuk dapat mengembangkan rencana sistem jaringan jalan nasional baru dalam rangka mendukung pengembangan wilayah.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini merupakan gabungan dari kajian beberapa teori (positivistik) tentang tatagunalahan, morfologi kota/wilayah serta jaringan jalan, serta menggunakan sumber kajian dari beberapa peraturan perundangan (rasionalistik) tentang tataruang dan wilayah, karakteristik dan fungsi jalan serta sistem transportasi nasional. Metode deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan menilai dari analisis data dalam bentuk angka-angka, sehingga dapat memberikan pertimbangan untuk penetapan status jalanguna pengembangan wilayah serta sistem jaringan jalan nasional kedepan. Proses analisis seperti yang tertera dalam gambar 1 Proses analisis kajian peningkatan ruas jalan Jawa Barat Selatan.



Sumber :Penulis, 2015

GAMBAR 1.
PROSES ANALISIS KAJIAN PENINGKATAN RUAS JALAN JAWA BARAT SELATAN

KAJIAN TEORI

Menurut Tamin (2000), sebaran geografis antara tata guna lahan (sistem kegiatan) serta kapasitas lokasi dari fasilitas transportasi (sistem jaringan) digabungkan untuk mendapatkan arus dan pola pergerakan lalu lintas di daerah perkotaan (sistem pergerakan). Besarnya arus dan pola pergerakan lalu lintas sebuah kota dapat memberikan umpan-balik untuk menetapkan lokasi tata guna lahan yang tentu membutuhkan prasarana baru pula. Yunus (2000, dalam Adji, 2008), menyatakan bahwa berdasarkan studi Herbert (1976) di beberapa kota di Amerika membuktikan bahwa perkembangan prasarana transportasi termasuk pembangunan jalan akan sangat mempengaruhi perkembangan dan morfologi kota. Menurut Adisasmita (2011), terdapat kota – kota pusat kegiatan, ada yang berskala besar, sedang dan kecil, kesemuanya tersusun secara hirarkis dan terorganisasi secara sistematis sehingga membentuk suatu Sistem Pusat Kegiatan. Menurut Frazila dan Tamin (1997), dalam kaitannya dengan sistem transportasi regional, perencanaan sistem transportasi diarahkan dalam mendukung RTRWP, oleh karena itu dalam mengkaji sistem transportasi regional diperlukan analisis potensi wilayah yang meliputi; kawasan industri, pertanian dan perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, sumber daya mineral, pariwisata dan perdagangan.

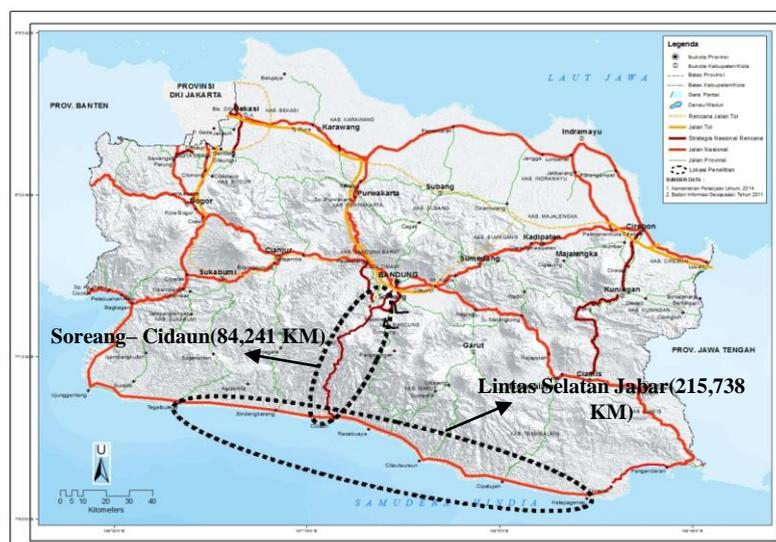
Hadihardjaja dkk, (1997, dalam Silitonga, 2011), menyatakan bahwa sistem transportasi adalah suatu bentuk keterkaitan dan keterkaitan antara penumpang, barang, prasarana dan sarana yang berinteraksi dalam rangka perpindahan orang atau barang, yang tercakup dalam suatu tatanan, baik secara alami ataupun buatan/rekayasa. Sistranas diwujudkan dalam 3 (tiga) tataran transportasi yaitu Tataran Transportasi Nasional (Tatranas), Tataran Transportasi

Wilayah (Tatrawil) dan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok). Ketiga tataran transportasi tersebut mempunyai hubungan kesisteman, terpadu, dan berdimensi waktu dalam bentuk jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi (Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 49 Tahun 2005).

GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5° 50' - 7° 50' Lintang Selatan dan 104° 48' - 108° 48' Bujur Timur, dengan batas – batas wilayah; sebelah Utara, dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta; sebelah Timur, dengan Provinsi Jawa Tengah; sebelah Selatan, dengan Samudra Indonesia ; sebelah Barat, dengan Provinsi Banten (gambar.2). Secara administratif pemerintahan, wilayah Jawa Barat terbagi kedalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan 9 kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar. Wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP), yaitu WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP Priangan Timur dan Pangandaran, WP Sukabumi dan sekitarnya, serta WP Kawasan Khusus (KK) Cekungan Bandung.

Kondisi umum ruas jalan yang disajikan dalam penelitian ini adalah jalur lintas selatan Jawa Barat yaitu ruas – ruas jalan dipesisir pantai selatan Jawa Barat yang berstatus non nasional (Strategis Nasional Rencana / SNR) ditambah dengan jalan penghubung ibukota provinsi Jawa Barat (Kota Bandung) dengan pesisir selatan Jawa Barat(Cidaun). Salahsatuindikator tingkat keberhasilan penanganan infrastruktur jalan adalah meningkatnya tingkat at kemantapan dan kondisi jalan. Belum terintegrasinya seluruh jaringan jalan di Jawa Barat dengan sistem jaringan jalan tol, menyebabkan rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastuktur jaringan jalan di Jawa Barat.



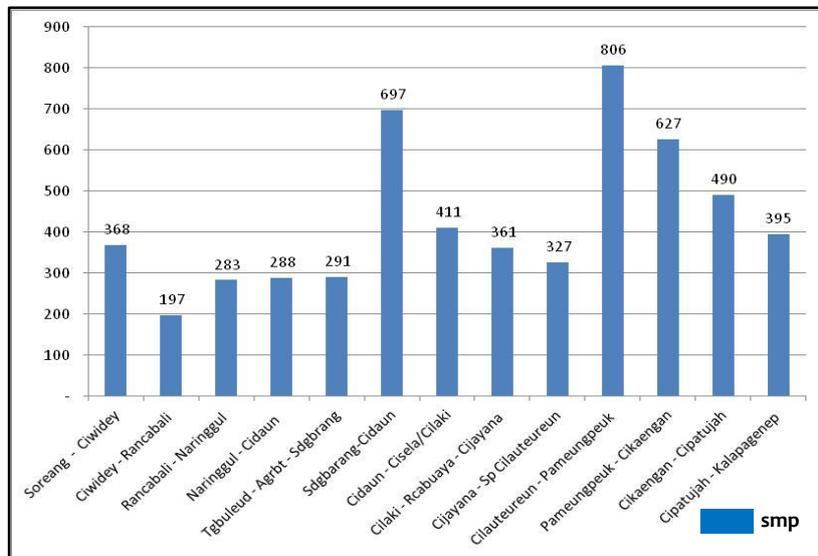
Sumber :Penulis, 2015

GAMBAR 2.
LINGKUP WILAYAH PENELITIAN

Analisis Tata Guna Lahan – Transportasi

a. Lalulintas Harian Rata-Rata

Perhitungan LHRT 2014 dengan asumsi tingkat pertumbuhan lalulintas yang digunakan adalah sebesar 5% pertahun (Manual Desain Perkerasan Jalan, 2013), sedangkan nilai faktor penyesuaian untuk LHR jalan perkotaan ($k=0,09$) dan luar perkotaan ($k=0,11$), maka didapatkan nilai LHRT 2014 pada masing-masing ruas seperti gambar 3.

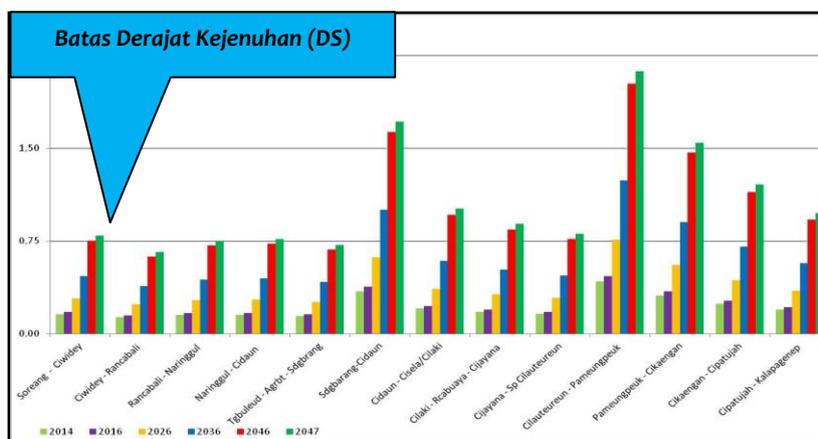


Sumber :Penulis, 2015

GAMBAR 3.
LHRT 2014 LINTAS SELATAN JAWA BARAT

b. Kinerja Ruas Jalan

Kinerja ruas jalan merupakan suatu ukuran tingkat pelayanan jalan, yaitu rasio perbandingan antara arus / volume lalulintas kendaraan (Q) yang melewati sebuah ruas jalan terhadap kapasitas ruas jalan (C) tersebut. Berdasarkan parameter yang telah ditentukan dalam penelitian ini bahwa nilai kinerja jalan (Nilai DS > 0,75), maka ruas jalan tersebut dinyatakan jenuh serta tingkat aksesibilitas ruas jalan tersebut adalah rendah. Didapatkan nilai DS pada masing-masing ruas seperti gambar.4



Sumber :Penulis, 2015

GAMBAR 4.
TINGKAT PELAYANAN JALAN LINTAS SELATAN JAWA BARAT

c. Tata Guna Lahan

Pengklasifikasian tata guna lahan bagian selatan Provinsi Jawa Barat menggunakan data citra Landsat 7 ETM+ tahun 2002 dan tahun 2011. Masing-masing citra diklasifikasikan menjadi delapan (8) jenis penggunaan lahan yaitu hutan, perkebunan, permukiman, pertanian lahan kering, sawah, semak/belukar, tambak, dan tanah terbuka. Hasil klasifikasi penggunaan lahan masing-masing tahun selanjutnya ditumpang-susun (*overlay*) untuk mengetahui perubahan tutupan lahan yang terjadi selama kurun waktu Sembilan (9) tahun dari tahun 2002 hingga tahun 2011.

TABEL 1.
PERUBAHAN LUASAN TATA GUNA LAHAN BAGIAN SELATAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2002 – 2011

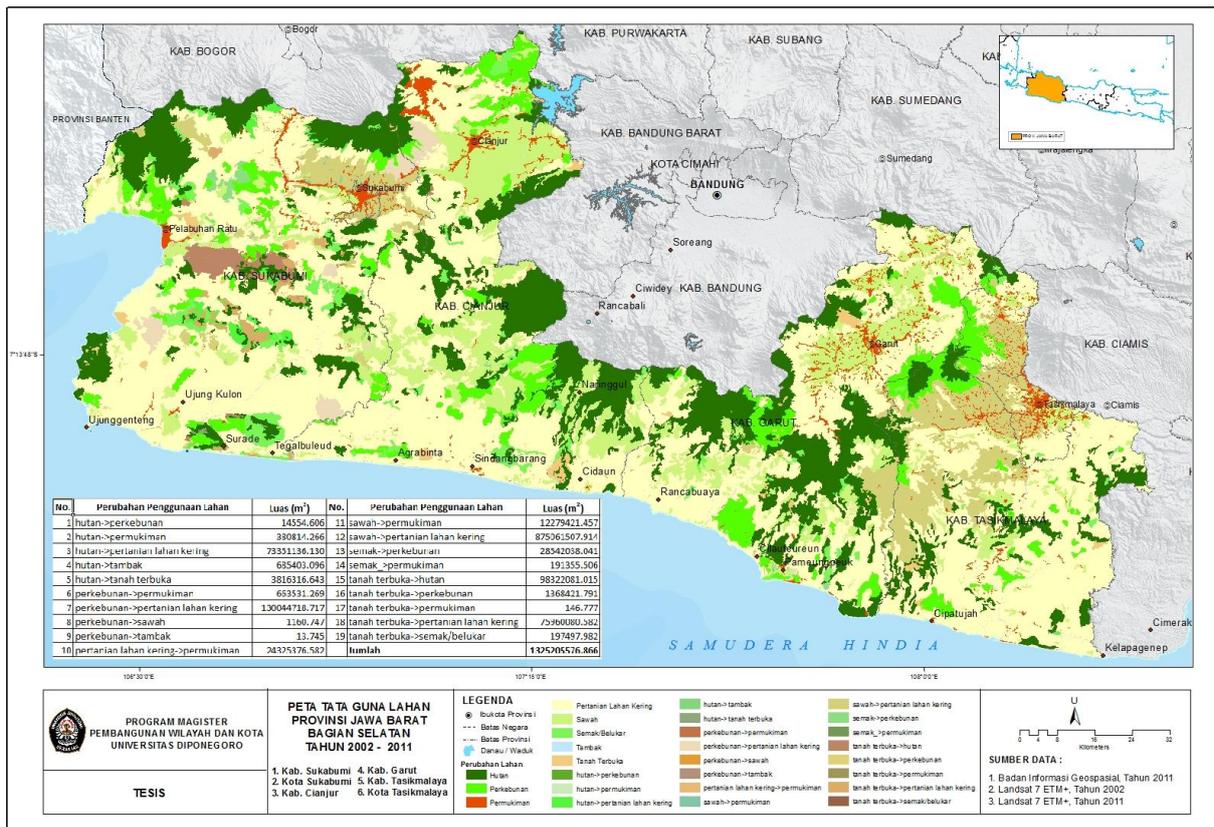
No.	Penggunaan Lahan	Tahun 2002		Tahun 2011	
		Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)	(%)
1	Hutan	251.043,870	18,30	253.051,255	18,45
2	Perkebunan	110.713,810	8,07	100.635,369	7,34
3	Permukiman	33.951,717	2,48	37.735,783	2,75
4	Pertanian Lahan Kering	655.958,524	47,82	768.967,731	56,06
5	Sawah	259.665,435	18,93	170.931,458	12,46
6	Semak/Belukar	30.946,477	2,26	28.092,887	2,05
7	Tambak	42,666	0,003	111,206	0,01
8	Tanah Terbuka	29.317,866	2,14	12.114,675	0,88
	Jumlah	1.371.640,365	100,00	1.371.640,365	100,00

Sumber : Penulis, 2015

Berdasarkan Tabel.1, terlihat perbedaan luasan penggunaan lahan tahun 2002 dan tahun 2011 berdasarkan masing-masing jenis penggunaan lahan. Beberapa penggunaan lahan ada yang berkurang luasannya seperti; perkebunan, sawah, semak/belukar, dan tanah terbuka; sedangkan di sisi lain penggunaan lahan seperti; hutan, pertanian lahan kering, tambak, dan permukiman bertambah. Pengurangan dan penambahan luasan penggunaan lahan dari tahun 2002 hingga tahun 2011 menunjukkan adanya perubahan penggunaan lahan, dengan kata lain terjadi alih fungsi suatu jenis penggunaan lahan menjadi penggunaan lahan lainnya.

Perubahan penggunaan lahan di bagian selatan Provinsi Jawa Barat dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2011 meskipun luasannya kecil yaitu sebesar 132.520,548 Ha, dibandingkan luas keseluruhan sebesar 1.371.640,365 Ha, memperlihatkan adanya pergerakan aktivitas penduduk ke arah selatan (gambar.5).

Pergerakan tersebut perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk menarik pergerakan yang semakin besar. Dukungan jalan yang sudah ada belum mampu meningkatkan mobilitas penduduk maupun barang terbukti dari hasil analisis perubahan tutupan lahan dan raih tidak terbangun menjadi terbangun sangat kecil persentasenya. Belum banyak penduduk yang tinggal dan menetap di bagian selatan Provinsi Jawa Barat sehingga perekonomian wilayah ini belum berkembang dan kemungkinan sangat bergantung pada sektor pertanian.

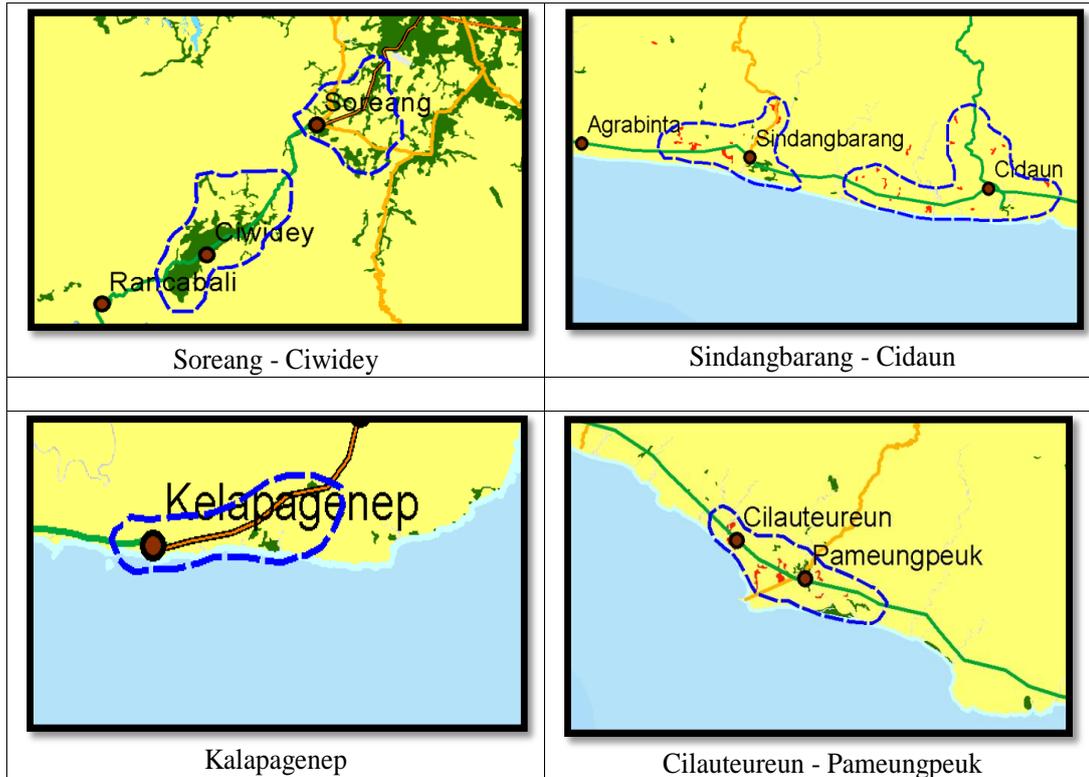


Sumber :Penulis, 2015

GAMBAR 5.
PETA PERUBAHAN TATA GUNA LAHAN BAGIAN SELATAN PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2002-2011

Analisis Pola Perkembangan Wilayah dan Sistem Jaringan Jalan

Terdapat pusat-pusat kegiatan wilayah pada sebagian besar ruas jalan lintas selatan dan menghubungkan satu dengan lainnya. Bentuk tipologi wilayah yang sebagian besar linier menerus memperlihatkan bahwa lahan terbangun berupa lahan permukiman mengikuti perkembangan jalan yang sudah ada (gambar.6). Analisis yang dapat disimpulkan adalah ruas jalan lintas selatan terklasifikasi seluruhnya dalam ruas jalan arteri primer dan kolektor primer walaupun terdapat beberapa ruas jalan yang tidak memiliki pusat-pusat kegiatan wilayah, akan tetapi dalam kebijakan perencanaan tidak dapat dipisahkan/dipilah sehingga harus menjadi satu kesatuan sistem jaringan jalan untuk dapat ditingkatkan status dan fungsinya menjadi jalan nasional.



Sumber :Penulis, 2015

GAMBAR 6.
PETA TIPOLOGI KOTA PADA WILAYAH PENELITIAN

Analisis Tata Ruang dan Wilayah

Survai dan observasi lapangan yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui potensi wilayah serta pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan menjadi kawasan agribisnis, agroindustri, industri kelautan dan pariwisata terpadu, yang mengoptimalkan sumberdaya lahan, pesisir dan kelautan. Lintas selatan Jawa Barat memiliki potensi wilayah yang menjanjikan bagi pengembangan wilayah. Potensi wilayah yang dilintasi oleh ruas jalan lintas selatan Jawa Barat antara lain adalah; pariwisata, agroindustri dan industri kelautan. Ruas jalan tersebut sebagian besar menjadi ruas jalan strategis provinsi yang menjadi infrastruktur pendukung bagi pengembangan kawasan strategis provinsi. Analisis yang disimpulkan bahwa sebagai kawasan pesisir pantai, potensi kelautan dan wisata bahari sangat potensial untuk dikembangkan (gambar.7). Keberadaan ruas jalan yang melintasi kawasan selatan Jawa Barat perlu segera ditingkatkan status dan fungsinya sebagai jalan kolektor primer sebagai upaya pendukung aksesibilitas pengembangan kawasan walaupun terdapat beberapa ruas jalan yang tidak memiliki pusat-pusat kegiatan wilayah, akan tetapi dalam kebijakan perencanaan tidak dapat dipisahkan/dipilah sehingga harus menjadi satu kesatuan sistem jaringan jalan untuk dapat ditingkatkan status dan fungsinya menjadi jalan nasional.

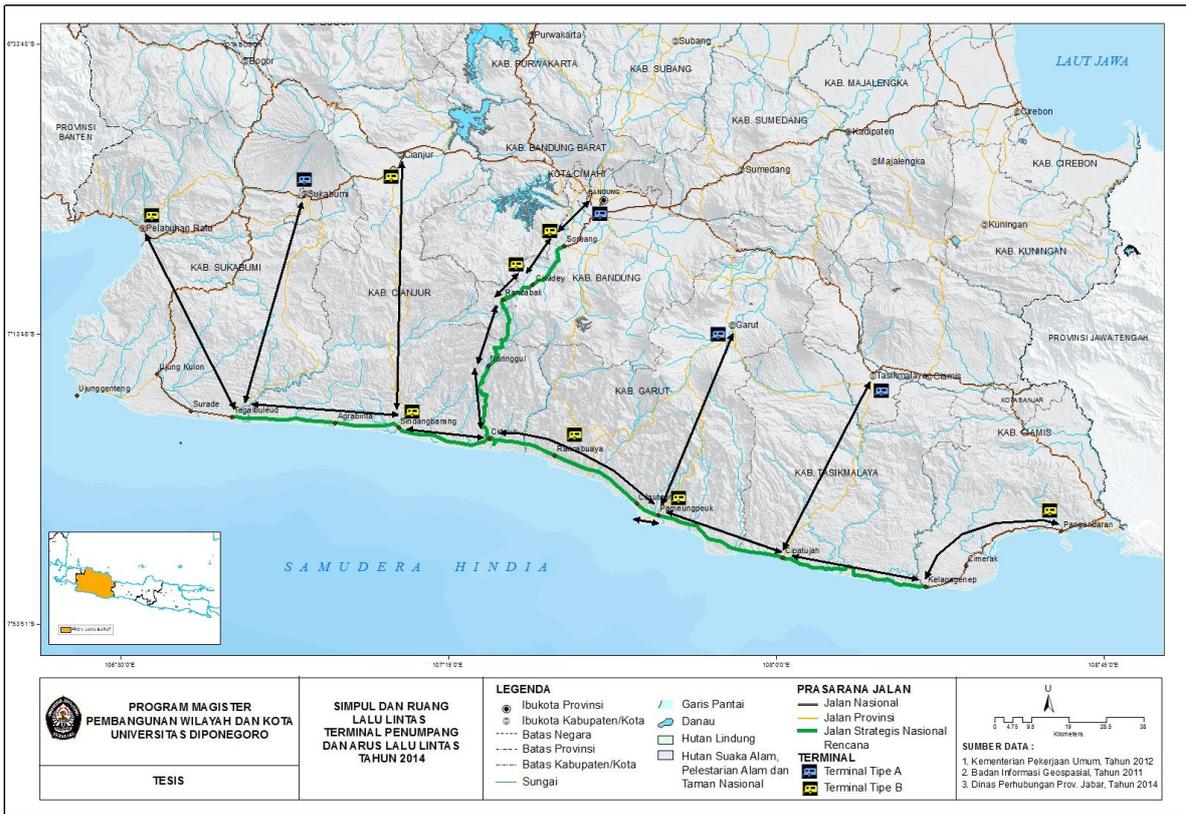


Sumber :Penulis, 2015

GAMBAR 7.
POTENSI WILAYAH DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PADA WILAYAH PENELITIAN

Analisis Sistem Transportasi

Simpul dan ruang lalu lintas berupa jaringan transportasi terminal bis penumpang, pelabuhan penumpang/penyeberangan serta bandar udara merupakan sarana pendukung dalam memperkuat konsep pengembangan suatu wilayah. simpul dan ruang lalu lintas terminal penumpang pada lintas selatan Jawa Barat adalah keseluruhan terminal yang ada merupakan terminal tipe-B(gambar.8). Belum berkembangnya simpul dan ruang lalu lintas terminal disebabkan karena arus lalu lintas pada ruas jalan tersebut masih relatif kecil. Hal ini pun terlihat jelas pada kondisi lalu lintas pada ruas jalan lintas selatan Jawa barat pada saat pelaksanaan survey. Ruas jalan tersebut belum perlu ditingkatkan fungsi dan statusnya.



Sumber :Penulis, 2015

**GAMBAR 8.
SIMPUL DAN RUANG LALULINTAS TERMINAL PENUMPANG TAHUN 2014**

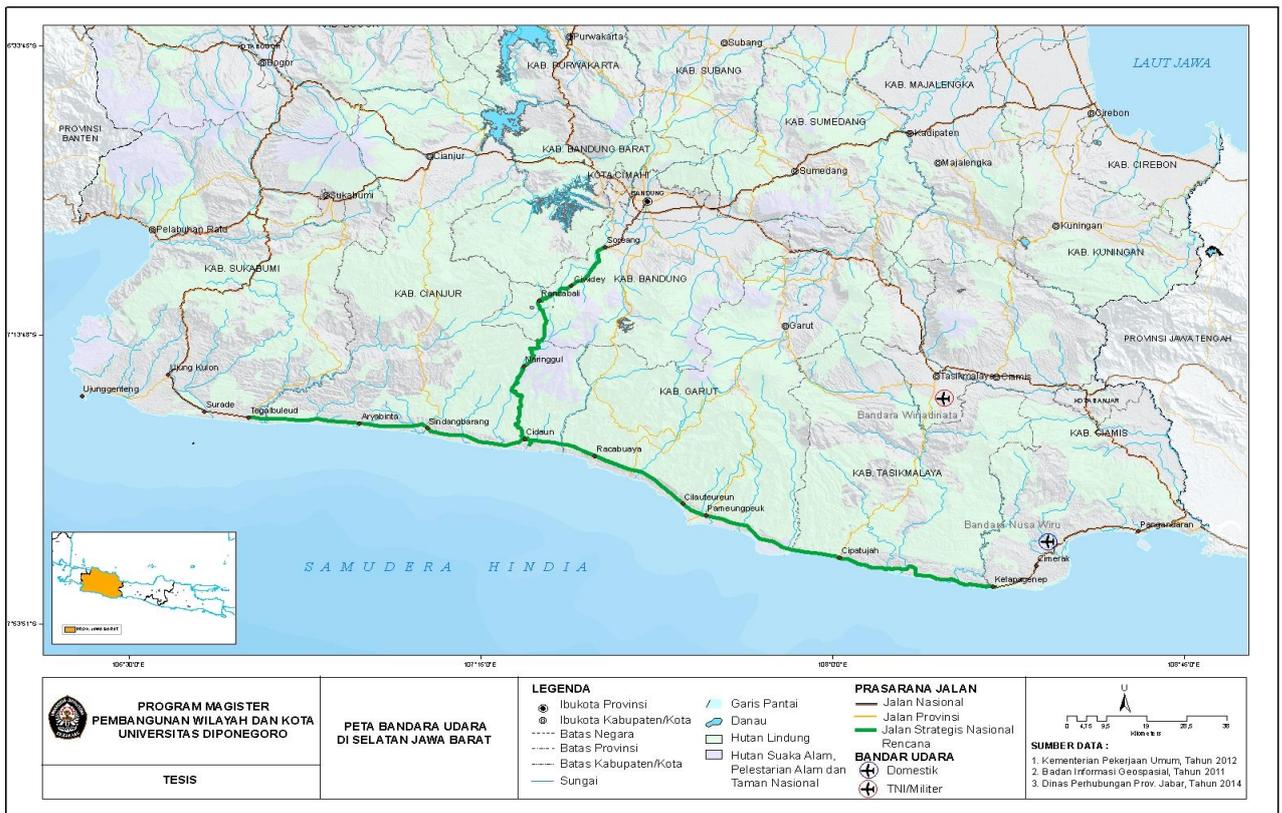
Simpul dan ruang lalulintas berupa pelabuhan – pelabuhan berada pada jalur lintas selatan Jawa Barat akan tetapi tidak dilintasi oleh ruas jalan yang menjadi penelitian tesis (gambar.9). Ruas jalan lintas selatan Jawa Barat yang menjadi penelitian tesis belum perlu ditingkatkan fungsi dan statusnya karena tidak terdapat pelabuhan penyeberangan yang terkoneksi dengan terminal penumpang.



Sumber :Penulis, 2015

GAMBAR 9.
SIMPUL DAN RUANG LALULINTAS PELABUHAN TAHUN 2014

Bandar udara Wiriadinata merupakan bandar udara yang dikelola oleh TNI-AU dengan jenis pelayanan lebih banyak digunakan untuk keperluan militer (TNI) sehingga fungsi domestik bandara tidak menjadi utama. Bandar udara Nusa Wiru merupakan bandar udara yang diusahakan dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendukung potensi wisata di Kabupaten Pangandaran. Keberadaan bandara Wiriadinata dan Nusawiru tidak dilintasi oleh ruas jalan yang menjadi penelitian tesis (gambar.10). Analisis yang disimpulkan adalah ruas jalan lintas selatan Jawa Barat belum perlu ditingkatkan fungsi dan statusnya karena tidak terdapat bandar udara yang terkoneksi dengan terminal penumpang pada ruas tersebut.



Sumber :Penulis, 2015

GAMBAR 10.
SIMPUL DAN RUANG LALULINTAS BANDAR UDARA TAHUN 2014

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah mengkaji peningkatan status ruas jalan lintas selatan Jawa Barat menjadi jalan nasional dengan variabel – variabel penelitian (i) tata guna lahan; (ii) pola perkembangan wilayah dan sistem jaringan jalan; (iii) tata ruang dan wilayah; serta (iv) tataran transportasi dalam Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS). Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut, maka disimpulkan bahwa variabel tata guna lahan – transportasi dan variabel tataran transportasi nasional (Sistranas) lebih dapat dijadikan pertimbangan realistis dalam penilaian peningkatan status dan fungsi ruas jalan dibandingkan variabel – variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, S. A., 2011. "Transportasi dan Pengembangan Wilayah". Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Direktorat Jenderal Bina Marga, 1997. "Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI)". Direktorat Bina Jalan Kota (BINKOT), Jakarta.
- Frazila R.B, Tamin O.Z, 1997. "Penerapan Konsep Interaksi Tata Guna Lahan-Sistem Transportasi Dalam Perencanaan Sistem Jaringan Transportasi". Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota ITB, Vol. 8, No.3, Juli 1997, Hal 34-52.
- Geurs K.T., Wee B.V., 2004. "Accessibility evaluation of land-use and transport strategies: review and research directions". Journal of Transport Geography 12 (2004) 127-140.
- Sugiyono, 2007. "Statistika untuk Penelitian". Bandung: CV. Alfabeta, 2007. Cet. XI.
- Tamin, O. Z., 2000. "Perencanaan dan Pemodelan Transportasi". Bandung : Penerbit ITB.